BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia,dengan jumlah penduduk sekitar 237 juta jiwa pada tahun 2010 dan pertumbuhan sekitar 1,49% pertahunya pada tahun 2011 membuat indonesia menduduki peringkat no 4 sebagai negara dengan penduduk terbanyak setelah Cina,India dan Amerika serikat[1]. Tingginya angka pertumbuhan nasional tentu disebabkan oleh pertumbuhan penduduk daerah yang sangat cepat,di provinsi yogyakarta pada tahun 2010 ada sekitar 3.457.491 jiwa yang terdiri dari kabupaten dan Kota antara lain, Kulonprogo (388.869 jiwa), Bantul (911.503 jiwa), Gunung Kidul (675.382 jiwa), Sleman (1.093.110 jiwa),dan Kota Yogyakarta (388.627).[2]

Melihat pertumbuhan yang sangat pesat sistem layanan publik secara tradisional tidak lagi memadai,diperlukan sistem modern yang bisa mengakses dan mendata jumlah penduduk yang begitu besar dalam satu data base,sehingga pelayanan kependudukan bisa dilakukan dengan efektif. Itulah kenapa e-goverment diperlukan dan harus segera diterapkan,pemerintah perlu melakukan tindakan nyata dan itu membutuhkan jaringan informasi dan teknologi yang memadai.

---

[1] Lihat http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/07/05/lnua4p-prediksi-bkkbn-2011-penduduk-indonesia-241-juta-jiwa diakses 28 maret 2012

[2] Lihat http://yogyakarta.bps.go.id/kependudukan.html diakses 28 maret 2012

Table 1. Jumlah penduduk di DI Yogyakarta 2010

	Nama kabupaten/Kota	Klasifikasi								
		Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
		Jenis kelamin			Jenis kelamin			Jenis kelamin		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kulon Progo	42.172	44.188	86.360	48.522	153.987	302.509	190.694	198.175	388.869
2	Bantul	380.393	381.003	761.396	74.098	76.009	150.107	454.491	457.012	911.503
3	Gunung Kidul	30.725	31.953	62.678	295.978	316.726	612.704	326.703	348.679	675.382
4	Sleman	501.149	497.051	998.200	46.736	48.174	94.910	547.885	545.225	1.093.110
5	Kota Yogyakarta	89.137	199.490	388.627	0	0	0	189.137	199.490	388.627

Sumber Website BPS Kota Yogyakarta

Sekarang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dunia telah semakin luas. Hal tersebut merupakan dampak dari perkembangan dunia IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Pada satu sisi, perkembangan dunia IPTEK telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Meskipun ada dampak negatif atau kelemahan yang timbul dari kemajuan IPTEK, namun hal ini seolah tertutupi oleh dampak positif atau manfaat kemajuan IPTEK.,perkembangan dunia IPTEK termasuk didalamnya adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai

maupun komunikasi menghasilkan manfaat positif bagi kehidupan manusia dan memberikan banyak kemudahan, seperti kemudahan dalam memperoleh informasi dan kemudahan bertransaksi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya, karena segala kegiatan dapat dilakukan dengan cepat, murah, dan tepat, sehingga produktivitas kerja akan meningkat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti dalam dunia pemerintahan (e-government), yang didalamnya memiliki program seperti dalam bidang pemerintah (e-KTP),dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronik.

Pemerintah menerapkan e-Government yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggungjawab, responsif, efektif dan efisien. e-Government memanfaatkan kemajuan komunikasi dan informasi pada berbagai aspek kehidupan, serta untuk peningkatan daya saing dengan negara-negara lain,yang saat ini sedang dilaksanakan dalam bidang pemerintahan adalah e-KTP (elektronik kartu tanda penduduk).

Dengan jumlah penduduk yang besar pemerintah indonesia memerlukan data kependudukan yang akurat, untuk itu pemerintah membuat program yang disebut dengan e-KTP. e-KTP merupakan cara baru yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan secara nasional,untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem biometrik yang ada di dalamnya, maka setiap pemilik e-KTP dapat terhubung kedalam satu database nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan

melalui Peraturan Presiden tahun 2009 tentang Penerapan KTP Bebasis NIK secara nasional ditetapkan.

Perintah penyelenggaraan dalam bidang kependudukan yaitu pelaksanaan program elektronik-KTP (e-KTP) oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu untuk mengurangi penyalahgunaan KTP yang marak dilakukan sebagian masyarakat. Melalui e-KTP, data-data kependudukan akan terekam pada satu server yang kemudian bisa diakses di seluruh Indonesia. Ini artinya tak ada lagi celah untuk memiliki KTP ganda. Sebab, satu warga hanya memiliki nomor induk kependudukan (NIK) tunggal dan berlaku di seluruh Indonesia.

Kartu penduduk merupakan identitas resmi yang menjadi bukti bahwa seseorang adalah warga Negara Indonesia,dalam rangka mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk maka diperlukan kode keamanan dan rekaman data kependudukan berbasis nomor induk kependudukan berbasis nasional Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah sedemikian pesatnya, baik dari segi infrastruktur, perangkat keras dan lunak. Maka e-KTP di perlukan untuk menjadi identitas penduduk yang berlaku diseluruh indonesia secara nasional.yang diharapkan dapat membantu untuk mengatasi sistem pelayanan publik yang lebih baik .

Pemuktahiran data kependudukan,penerbitan NIK dan penerapan KTP berbasis NIK nasional (e-KTP) dilakukan secara bertahap yaitu,pada tahun 2010 pemuktahiran data kependudukan di semua kota/kabupaten (kecuali provinsi DKI Jakarta) melalui anggaran dekonsentrasi,kemudian penerbitan NIK di 329 kabupaten/kota yang sudah menggunakan SIAK dalam pelayanan.pada tahun 2011 penerbitan NIK di 168 kabupaten/kota dan

penerapan e-KTP di 197 kabupaten/kota.pada tahun 2012 penerapan E-KTP di 300 kabupaten/kota.pemuktahiran data kependudukan ini dilakukan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil masing-masing kota/kabupaten yang bekerjasama dengan aparat kecamatan,desa/kelurahan,RT,RW dan kepala keluarga yang tentunya dengan demikian pemuktahiran data bisa diselesaikan tepat waktu.

Di Kota Yogyakarta pelaksanaan E-KTP dilakukan pada tahun 2011 dengan menyebarkan undangan kepada sekitar 290 KK (Kepala keluarga) pada hari pertama dan yang hadir mencapai 70% dari undangan tersebut. Dari 332.314 wajib KTP di Yogyakarta sudah 3.312 warga yang telah direkam data kependudukannya "dihitung dari prosentase wajib KTP baru 0,99 persen satu hari kemarin. Undangan disebarkan di tiap kecamatan sebanyak 290 KK (Nur Affandi)[3].

Kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit hal ini dikarenakan berkurangnya jumlah penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 17 ribu pada tahun 2012."Penurunan tersebut disebabkan beberapa hal, di antaranya adalah pemutakhiran data kependudukan, perpindahan, kelahiran dan kematian"(Deddy Feriza)[4],sehingga pada tahun 2012 penduduk kota yogyakarta hanya sekitar 371 jiwa,dengan demikian seharusnya pemerintah kota yogyakarta dalam hal ini dinas kependudukan dan catatan sipil bisa lebih cepat menuntaskan pendataan e-KTP lebih cepat dari pada kabupaten dan kota lainya.Wilayah Kota Yogyakarta yang tidak terlalu luas yaitu 32,5 km dan

[3] Lihat http://jogja.tribunnews.com/2011/10/05/pelaksanaan-e-ktp-hari-pertama-di-yogyakarta-capai-70-persen diakses 20 maret 2012
[4] Lihat http://metrotvnews.com/read/news/2012/02/09/81396/Penduduk-Yogyakarta-Berkurang-17.525-Jiwa diakses 28 maret 2012

penduduk sekitar 371 ribu jiwa,sangat kecil dibandingkan dengan kota/kabupaten lainya.

Jika dilihat dari hasil hari pertama pelaksanaan e-KTP yang cukup bagus maka seharusnya dalam waktu kurang lebih seratus hari semua penduduk kota yogyakarta sudah di data melalui e-KTP namun sampe maret 2012 target pelaksanaan e-KTP baru mencapai 76-80% memang persentase tersebut sudah cukup besar,namun jika di bandingkan dengan kabupaten bantul yang pada akhir maret 2012 ini mencapai 67% yang jumlah penduduknya 3 kali lipat kota yogyakarta,ini sangat mengecewakan,padahal target waktu pencapaian 100% adalah april mendatang.

Belum lagi jika dibandingkan dengan kota yang telah menerima e-KTP dari Mendagri yaitu kota Solok dan Padang panjang. Di Sumbar terdapat dua kota yang telah menyelesaikan KTP sesuai target yakni Kota Solok dan Kota Padang Panjang[5], sedangkan 7 kabupaten kota lainnya sudah mencapai 83% Untuk Kota Solok telah diserahkan KTP Elektronik 38.806 keping dan piagam penghargaan kepada Walikota dan ketua DPRD Kota Solok, serta Kota Padang Panjang sebanyak 29.434 keping KTP serta piagam penghargaan kepada Walikota dan Ketua DPRD Padang Panjang sebagai bukti keseriusan kedua daerah tersebut menyelesaikan pengerjaan KTP Elektronik hampir seratus persen selesai[6].

Dari 197 Kab/Kota di 33 Prov, Prosentase tertinggi dlm pelayanan e-KTP di-raih Prov. BABEL (90,81 %) dan kedua Prov. SUMBAR (83,30 %).Khusus bagi 197 Kab/Kota, batas waktu penyelesaian Paling Lambat

[5] Lihat http://www.beritanda.com/nusantara/sumatera/sumatera-barat/6011-mendagri-serahkan-e-ktp-di-dua-kabupaten-kota.html diakses 05 sep 2012
[6] Lihat http://www.beritanda.com/nusantara/sumatera/sumatera-barat/6011-mendagri-serahkan-e-ktp-di-dua-kabupaten-kota.html diakses 05 sep 2012

tanggal 30 April 2012. Bagi 10 Kab/Kota yang masuk 300 Kab/Kota, batas waktu penyelesaian paling lambat tanggal 30 Oktober 2012.[7]

Rendahnya capaian tersebut karena masih banyaknya kendala yang di hadapi pemerintah kota Yogyakarta di antaranya keterlambatan datangnya peralatan yang diperlukan, jumlah peralatan yang tidak sesuai kebutuhan dan sebagainya.Persoalan utama yang membuat pelaksanaan e-KTP terkendala adalah keterlambatan alat perekam data e-KTP dari pusat. Di Kota Yogya, petugas kecamatan kewalahan karena masyarakat sudah terlanjur mengantri sesuai jadwal yang telah ditetapkan, tetapi alat perekamnya terbatas. Selain itu alat perekam data mobile juga terlambat tiba. Alat ini berfungsi untuk melayani wajib KTP yang secara fisik tidak mampu datang ke kecamatan untuk melakukan perekaman data. Sehingga masyarakat yang secara fisik tak mampu datang ke kecamatan harus bersabar untuk melakukan perekaman data.

Permasalahanya alat perekam data mobile ini pun. sangat terbatas untuk Kota Yogyakarta sendiri baru menerima satu alat sedangkan kota yogyakarta sendiri membutuhkan setidaknya tiga alat "Alat mobile sudah tiba di Kota Jogja tapi baru satu alat saja. Melihat kebutuhan kami yang cukup banyak kami sudah mengajukan peminjaman alat ke pusat, paling tidak kami membutuhkan dua alat lagi"(Nur afandi).[8] keterbatasan alat perkaman data ini membuat pelaksanaan e-KTP di kota yogyakarta menjadi lambat,karena kota yogyakarta dalam pelaksanaan e-KTP baik itu peralatan maupun anggaran

[7] Lihat http://beritanda.com/nusantara/kolom-nusantara/sumatera-barat/6011-mendagri-serahkan-e-ktp-di-dua-kabupaten-kota.html di akses 20 maret 2012
[8] Lihat http://www.solopos.com/2011/harian-jogja/kota-jogja/dindukcapil-kota-jogja-kekurangan-alat-e-ktp-mobile-150833 di akses 28 maret 2012

semuanya berasal dari pemerintah pusat yang pada akhirnya mereka harus menganggarkan dana jika mereka harus membiayai sendiri

Permasalahan lainya yaitu terbatasnya sumber daya manusia juga menjadi kendala lain yang semakin memperlambat proses pembutan e-KTP. Banyak petugas di sejumlah kecamatan di DIY yang tak cakap menggunakan alat pemindai kornea atau melakukan input data ke jaringan. sehingga, proses yang harusnya bisa selesai 15 menit bisa mundur menjadi setengah jam. Untuk Menyikapi tertundanya jadwal pembuatan e-KTP, Pemerintah Kota Yogya menganggarkan dana Rp 1,07 miliar untuk mengantisipasi bila pada 2012 mereka harus membiayai sendiri pelaksanaan program tersebut. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta Nur Affandi mengatakan,"pembuatan e-KTP di Yogyakarta pada 2011 seluruhnya dibiayai pemerintah pusat. Dana diberikan hingga akhir Desember, dengan target Kota Gudeg harus dapat merekam data penduduk sebanyak 371 orang. Namun, akibat terlambatnya pengiriman peralatan perekaman dari pusat, target perekaman data tak dapat tercapai".[9]

Melihat banyaknya kendala yang dihadapi pemerintah Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan e-KTP maka sudah pasti pemerintah Kota Yogyakarta punya Strategi-strategi efektifitas mulai dari strategi sosialisasi, pemasaran,pelaksanaan hingga strategi scenario terburuk jika target tidak bisa di tuntaskan tepat waktu. Tentu dalam hal ini yaitu Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kota Yogyakarta,walaupun pendataan e-KTP belum tuntas namun sudah mencapai 80% dari target yang diharapkan,dan pemerintah kota sendiri optimis akan mampu menuntaskan pendataan pada April 2012

nanti,melihat betapa pentingnya untuk mengetahui bagaimana pemerintah kota yogyakarta dalam pelaksanaan kebijakan e-KTP sehingga nantinya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis maupun orang lain maka disini penulis tertarik untuk mengangkat judul di atas yaitu "Implementasi program e-KTP Di Kota Yogyakarta 2011-2012(Studi kasus Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program e-KTP di Kota Yogyakarta 2011-2012?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi program e-KTP di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program e-KTP di Kota Yogyakarta
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi program e-KTP di kota yogyakarta
3. Selain itu juga penelitian ini sebagai upaya memperkaya kajian studi Ilmu Pemerintahan secara empiris. Secara khusus juga penelitian ini sebagai upaya sebuah intelektual yang penulis lakukan setelah menempuh masa studi di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sekaligus sebagai prasyarat dalam menyelesaikan pendidikan sarjana.

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pengembangan Ilmu Pemerintahan khususnya matakuliah Implementasi
2. Sebagai pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti dan mahasiswa lain untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai pelaksanaan e-KTP di kota yogyakarta
3. Bagi pemerintah daerah nantinya dapat memaksimalkan pelaksanaan program e-KTP di kota yogyakarta maupun kota lainya
4. Bagi peneliti sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan skripsi

E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori dimaksudkan untuk mengetahui sejumlah landasan teori atau teori-teori yang digunakan dalam melakukan penelitian sehingga kegiatan penelitian tersebut menjadi jelas, sistematis, terarah dan ilmiah. Menurut Sofian Effendi, teori adalah serangakaian asumsi, konsep, kontrak, defenis, proposisi untuk menerangkan sesuatu fonomena sosial secara sisematik dengan cara merumuskan hubungan anatara konsep[10].

Sedangkan menurut Koentjaraningrat, teori merupakan pengaturan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti disuatu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat[11].

---

[10] Sofian Efendi (eds.) Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES.
[11] Metode Penelitian Masyarakat, 1997

Dari defenisi tersebut diatas, maka teori mengandung tiga hal:

1. Teori adalah serangkaian proposisi antara konsep yang salaing berhubungan.
2. Teori adalah menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep.
3. Teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungan tersebut.

Dari pengertian tentang teori itu, dapat dijelaskan bahwa pada saat peneliti mengkonsep sebuah teori, maka pada saat yang sama Peneliti tersebut telah memberikan asumsi terhadap sebuah realitas atau fenomena sosial yang parsial, sedangkan realitas itu sendiri pada hakekatnya selalu berubah. Inilah yang menyebabkan penggunaan tori tidak selalu tepat jika dihubungkan dengan relaitas lainnya. Akan tetapi hal itu belum tentu membuktikan bahwa teori itu salah. Hal ini disebabkan karena dikonstruk pada sebuah realitas dalam waktu tertentu yang bersifat parsial. Maka untuk membuktikapan apakah teori itu benar atau salah, perlu dilakukan sebuah pengujian kembali pada teori tersebut dalam sebuah realitas yang berbeda, yang memiliki persamaan prinsip atau variabel-variabel dengan teori sebelumnya.

1. Pengertian Kebijakan Publik

Robert Eyestone mengatakan secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai "hubungan suatu unit pemerintah dengan dengan lingkunganya".[12]konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung arti yang sangat luas,karena yang di maksud dengan kebijakan publik bisa menyangkut

[12] Robert Eyestone (1971) *the treads of policy: A study in Policy Leadership Indianapolis:* Bobbs-Merril,hlm. 18

bayak hal.Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa "kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan"[13].

Menurut pakar ilmu politik lain,Richarh rose menyarankan bahwa "kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyaknya berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri"[14].

Sedangkan Carl Fried-rich memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang di usulkan oleh seseorang,kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.definisi yang diberikan oleh fried-rich ini menyangkut dimensi yang luas karena kebijakan tidak hanya dipahamisebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh kelompok maupun individu.Namun satu hal yang perlu dingat dalam mendefinisikan kebijakan adalah bahwa pendefinisian kebijakan harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan ketimbang apa yang di usulkan dalam tindakan mengenai persoalan tertentu.hal ini dilakukan karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahapan implementasi dan evaluasi sehingga definisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang si usulkan menjadi kurang memadai.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka defenisi kebijakan publik yang ditawarkan James Anderson dalam hemat penulis lebih lebih tepat.Menurut Anderson kebijakan merupakan arahan tindakan yang mempunyai maksud yang

---

[13] Thomas R.Dye (1975).Understanding Public Policy.Second Edition. Englewood Cliff,N.j:Prentice hall,hlm 1.

[14] Richard Rose (ed) (1969) Policy Making in Great Britain London:MacMillan hml 79

telah ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.[15]

2. **Pengertian Implementasi**

Implementasi dipandang dalam pengertian yang luas,merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang.implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor,organisasi prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau program-program[16]. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses,suatu keluaran(output) maupun sebagai suatu dampak (outcome).

Ripley dan franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program ,kebijakan,keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata. Implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti peryataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasl yang di inginkan oleh pejabat pemerintah.impelmentasi mencakup tindakan-tindakan berbagai aktor,khususnya birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan[17].

Sedangkan Grindle memberikan pandanganya tentang implementasi bahwa secara umum,tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah[18].

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-

---

[15] Anderson,Op.Cit.,hlm.4.
[16] Lester dan Srewart,OP.Cit.,hlm.104.
[17] Randall B.Ripley dan Grace A.Franklin (1982).Bureaucracy and Policy Implementation.Homewood,Illiois:The Dorsey Press,hlm.4.
[18] MerileeS.Grindle (1980).Politic and Policy Implementation in the Third World.Princeton,New Jersey:Princeton University Press,hlm.6.

kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.[19]

a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

1) komunikasi

"komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik."[20]. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengkur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam Winarno[21] mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:transmisi,kejelasan dan konsistensi

1. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali komunikasi yang telah melalui beberapa tingkatan birokrasi menyebabkan terjadinya salah pengertian (miskomunikasi).
2. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas, akurat, dan tidak bersifat ambigu, sehingga dapat dihindari terjadinya perbedaan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan seperti yang telah ditetapkan (tidak tepat sasaran).
3. Konsistensi; perintah yang diberikan kepada implementor haruslah konsisten dan jelas. Karena apabila perintah sering berubah-ubah akan membingungkan pelaksana kebijakan,sehingga tujuan dari kebijakan tidak akan dapat tercapai

---

[19] Donal van Meter dan Carl van Horn,Op.Cit.,hlm,447.

[20] Agustino, Leo. 2006. Politik & Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung

2) **Sumber Daya**

Menurut Edward III, sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari Staf,informasi dan fasilitas[22].

1. staf / pegawai, atau lebih tepatnya street-level bureaucrats. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf / pegawai yang tidak memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten dibidangnya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan staf pelaksana kebijakan. Misalkan saja implementasi Kebijakan kebijakan mengenai e-KTP, harus mempertimbangkan cakupan wilayah dalam satu Kecamatan, sehingga dapat ditentukan berapa banyak pegawai yang akan melayani masyarakat dalam pembuatan e-KTP.
2. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan, implementor harus mengetahui apakah

[22] Budi Winarno. 2005. Teori & Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut patuh terhadap hukum.

3. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang, akan tetapi tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

3) Disposisi

Edward III Mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif "[23].Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan menurut Edward III, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan pada variabel disposisi menurut Edward III antara lain:

1. Pengangkatan birokrat; pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga. Disposisi atau sikap para implementor yang tidak mau melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan

akan menimbulkan hambatan-hambatan bagi tercapainya tujuan dari pengimplementasian kebijakan.

2. Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi kecenderungan sikap para pelaksana kebijakan adalah dengan memanipulasi insentif[24]. Pada umunya, orang bertindak berdasarkan kepentingan meraka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin dapat memotivasi para pelaksana kebijakan untuk dapat melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan dalam upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

4) Struktur Birokrasi

Menurut edward III Birokrasi merupakan badan yang secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan.birokrasi sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam memecahkan masalah-masalah.Menurut edward struktur birokrasi yang panjang dalam implementasi kebijakan sering kali menciptakan perbedaan-perbedaan yang menghalangi kebijakan tersebut[25].

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

---

[24] Budi Winarno 2005. Teori & Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
[25] Budi Winarno2005. Teori & Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

1. Standard Operating Prosedures (SOPs); adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Fragmentasi; adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit.

Jadi krangka teoritik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Gambar1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

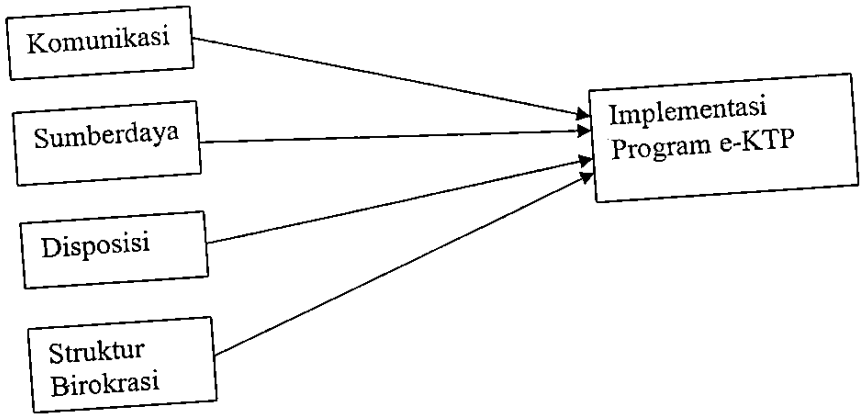

3. Pengertian e-KTP

Pengertian kartu tanda penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan elektronik KTP disingkat menjadi e-KTP yaitu identitas resmi penduduk sebagai bukti kependudukan yang menggunakan NIK berskala nasional.

Nomor induk kependudukan , selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.KTP berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. (e-KTP)

Penduduk wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah

Kode keamanan adalah alat identifikasi jati diri yang menunjukan identitas diri penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentikasi diri yang memastikan dokumenkependudukan sebagai milik orang tersebut.

Rekaman elektronik adalah alat penyimpan data elektronik penduduk yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan sebagai pengaman data kependudukan.

E-KTP merupakan KTP Nasional yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional, dan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009. Dengan peraturan tersebut maka e- KTP berlaku secara nasional, dengan demikian mempermudah masyarakat untuk mendapatkan Pelayanan dari lembaga Pemerintah dan Swasta karena tidak lagi memerlukan KTP setempat. implementasi e-KTP oleh dinas kependudukan dan

1. Sosialisasi pembuatan e-KTP:Pemerintah membagikan undangan kepada masyarakat,untuk segera melakukan perekaman data di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil ataupun di kantor kecamatan
2. Perekaman data kependudukan oleh pemerintah yang meliputi hal-hal berikut , yaitu:
   a) Pembacaan biodata; Warga datang berdasarkan waktu yang telah ditentukan dengan membawa surat pengantar yang telah diberikan oleh pihak RT/RW setempat;
   b) Foto; Warga diharuskan melakukan foto diri terlebih dahulu. Foto yang dilakukan sebaiknya memakai pakaian yang rapi, karena foto e-KTP ini hanya dilakukan satu kali saja dan tidak bisa diganti dalam jangkan waktu 5 (lima tahun) kecuali kartu tersebut rusak atau hilang sebelum waktu masa perpanjangan;
   c) Perekaman tanda tangan; Warga diwajibkan melakukan tanda tangan untuk kemudian direkam kedalam komputer dan disimpan untuk identitas warga;
   d) Scan sidik jari; Scan sidik jari ini dilakukan dengan kelima jari warga, jika warga mengalami kecacatan pada jari, maka dapat dilakukan dengan jari yang ada saja;
   e) Scan retina mata; Tahap ini dilakukan untuk menjamin keakuratan dari warga tersebut karena scan jari tidak dapat menjamin keakuratan e-KTP, bisa saja ketika dilakukan tahap scan jari, warga tersebut memakai jari orang lain. Untuk itu

dilakukan scan retina karena retina digantikan oleh orang lain.

3. Pembagian e-KTP:pemerintah mer msyrakat yang e-KTP nya sudah tersebut segera mengambil e-KTP dengan panggilan dan KTP yang lama untuk diserahkan kepada pe

Sedangkan manfaat e- KTP bagi masyarakat, bangsa dan negara, diantaranya yaitu:

1. Untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat;
2. Untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat khususnya yang berkaitan dengan data penduduk wajib KTP yang identik dengan data penduduk potensial pemilih pemilu, sehingga sering terjadi permasalahan;
3. Dapat mendukung peningkatan keamanan negara sebagai dampak positif dari tertutupnya peluang KTP ganda dan KTP palsu, dimana selama ini para pelaku kriminal selalu menggunakan KTP ganda dan KTP palsu

F. Definisi Konsepsional

Defenisi konsepsional adalah definisi dari konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian yang sudah dijabarkan dalam kerangka dasar teori. Defenisi konsepsional merupakan suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara satu konsep dengan konsep lainnya agar tidak

mengenai suatu fenomena yang diumuskan atas dasar generalisasi dan sejumlah karakteristik kejadian.

Defenisi Konsepsional yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi program e-KTP

Implementasi adalah usaha mewujudkan suatu peraturan atau kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah sehingga tujuan tujuan kebijakan tersebut bisa tercapai.atau melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang di inginkan sedangkan Elektronik KTP disingkat menjadi e-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional.

2.Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi yaitu:

a. Komunikasi: bagaimana penyampaian informasi mengenai program e-KTP baik kepada masyarakat maupun pihak pelaksana
b. Sumber-Sumber: sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan program e-KTP
c. Disposisi (Kecenderungan-Kecenderungan):bagaimana sikap pelaksana maupun para pembuat kebijakan terhadap kebijakan yang di buat,terkait dengan ada atau tidaknya dukungan terhadap kebijakan yang di implementasikan
d. Struktur Birokrasi :bagaimana struktur dalam birokrasi mengambat pelaksanaan program,para pelaksana mungkin

yang cukup tetapi dalam pelaksanaanya masih terhambat birokrasi

G. Definisi Operasional

1.Implementasi program e-KTP:

a) Sosialisasi dan Pembagian undangan pembuatan e-KTP

b) Proses perekaman data

1) Pembacaan biodata

2) Pengambilan foto

3) Perekaman tanda tangan

4) Scan sidik jari

5) Scan retina mata

c) 3.Penerbitan e-KTP

1) Pembagian surat panggilan

2) Pengambilan e-KTP

2.Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program e-KTP

a) Komunikasi :

1) transmisi

2) kejelasan

3) konsistensi

b) Sumberdaya:

1) Staff

2) Fasilitas dan peralatan

c) disposisi (sikap pelaksana)

1) [illegible] kependudukan dan pencatatan sipil

d) Struktur birokrasi: rantai birokrasi dan SOP (Standard operational procedure)

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, sebuah penelitian merupakan suatu proses yang panjang dan diawali oleh minat dan keinginan yang mendalam untuk mengetahui fenomena-fenomena yang akan diteliti dan pada akhirnya berkembang menjadi sebuah gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode yang sesuai serta seterusnya. Jadi hal yang paling penting dilakukan oleh seorang peneliti adalah adanya minat untuk melakukan penelitian terhadap sebuah fenomena tersebut. Dari penelitian yang akan diangkat peneliti mengunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dari penjelasan diatas peneliti mengunakan jenis penelitian dengan mengunakan penelitian kualitatif (deskriptif) dengan pendekatan survei dan menggunakan teknik simple random sampling. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada sejumlah responden yaitu masyarakat kota Yogyakarta yang sudah membuat e-KTP. Penelitian deskriptif analisis yakni penelitian yang menggambarkan suatu persoalan atau permasalahan yang terjadi untuk dicari sebuah kesimpulan yang akurat terhadap kasus yang telah terjadi. Penelitian deskriptif juga sebuah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang

2. **Jenis Data**

Jenis data yang akan dipakai oleh penulis adalah data sekunder yang memiliki arti data yang diperoleh dari hasil atau bahan-bahan dokumenter tentang obyek penelitian. Lebih tepatnya data sekunder yang penulis gunakan yakni data yang didapatkan dari library research (Studi Kepustakaan) yaitu data dari internet dan data dari document yang didapat dari Dinas dan Instansi terkait.Sedangkan data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dengan Kepala seksi data dan informasi Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil dan kuisioner yang dibagikan kepada 50 orang masyarakat yang terlibat langsung

3. **Teknik Pengumpulan Data**

a.Interview

Adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengumpulkan data dengan komunikasi langsung dengan subyek, peneliti baik dalam situasi yang sebenarnya ataupun buatan.Interview Mengenai bagaimana implementasi e-KTP di Kota Yogyakarta dan faktor apa saja yang mempengaruhinya dilakukan di Dinas Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.Nara sumbernya adalah Deddy Farizza Kepala seksi data dan informasi Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil.

b.Dokumentasi

Adalah data-data berupa tabel-tabel dan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu di Dinas Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Dokumentasi yang diperoleh diharapkan dapat memperkuat argumentasi yang dibangun oleh penulis.berikut adalah dokument yang

yogyakarta,dokument spesifikasi e-KTP,dokumen dasar hukum e-KTP,dan lain-lain

c.Survei

Adalah metode mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden,biasanya pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan terstruktur,pertanyaan di ajukan kepada 50 orang masyarakat yang didapat dari 5 % dari jumlah warga yang mengambil e-KTP pada bulan November 2012 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Yogyakarta

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan skala Likert, karena skala Likert berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu. Alternatif pertanyaannya misalkan, dari setuju sampai tidak setuju, senang sampai tidak senang, puas sampai tidak puas, atau baik sampai tidak baik. Dalam penelitian ini skala Likert yang digunakan adalah 5 tingkatan yang terdiri dari

Table 2. Tingkatan Pendapat Masyarakat

Skala likert	Performa implementasi
5	Sangat baik
4	baik
3	Cukup baik
2	Kurang baik
1	Sangat kurang baik

I. Teknik Analisa Data

Dalam analisis data penyusun membagi menjadi 2 bagian.pertama mengunakan analisa kualitatif, artinya suatu penilaian yang menggambarkan atau melukiskan suatu pristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum dengan penjelasan secara interpretatif yaitu usaha pengambilan kesimpulan berdasarkan pemikiran dan perkiraan logis atas dasar yang diperoleh, terutama untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan e-KTP di Kota Yogyakarta.

Yang kedua yaitu dengan menggunakan statistik deskriptif yang akan membahas sebaran data, Statistik deskriptif berkenaan dengan bagaimana data dapat digambarkan (dideskripsikan) atau disimpulkan baik secara numerik (misal menghitung rata-rata dan deviasi standar) atau secara grafis (dalam bentuk tabel atau grafik) untuk mendapatkan gambaran sekilas mengenai data tersebut sehingga lebih mudah dibaca dan bermakna adapun pendekatan yang digunakan dalam mengolah data tersebut yaitu dengan pendekatan likert.

1. **Rumus umum pendekatan skala likert:**

Jumlah skor tertinggi= skoring tertinggi x jumlah responden(N) = 5x 50 = 250(100%)

Jumlah skor terendah = skoring terendah x jumlah responden(N) = 1 x 50= 50(50/250 x 100% = 20%)

Kriteria penilaian skor =jumlah skor tertinggi: kriteria(K)=250/5=50

Pedoman tingkat pelayanan

0-50=sangat kurang baik. 50-100=kurang baik. 100-150=cukup baik. 150-200=baik. 200-250=sangat baik

Apabila jumlah skor yang didapat dari pertanyaan 1 adalah 100 maka